

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Kecil (UMKM) dalam pembangunan moneter suatu negara sangatlah penting, karena sektor keuangan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah. Masyarakat berperan pada pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, terutama pada UMKM. Dalam perekonomian masyarakat di Indonesia, UMKM memiliki fungsi utama dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Sebab, mayoritas perekonomian Indonesia bertumpu pada UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah unit UMKM di Lampung Tengah mencapai 4.111 unit di tahun 2023, di mana 169 unit UMKM ialah UMKM yang ada di Kecamatan Seputih Mataram yang ialah lokasi dari penelitian. Jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) terus meningkat setiap tahun sejak krisis ekonomi. Ini juga menunjukkan bahwasanya UMKM dapat bertahan di tengah krisis ekonomi dan menarik lebih banyak tenaga kerja ke ekonomi nasional. Akibatnya, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan (Sarfiah, dkk., 2019).

Para pelaku UMKM menghadapi tantangan yang signifikan untuk menjadi pilar perekonomian Indonesia karena mereka harus membuat usaha mereka bertahan. Meskipun demikian, banyak UMKM yang gulung tikar karena krisis ekonomi Indonesia sehingga tidak dapat mempertahankan bisnis mereka. Namun, banyak dari mereka yang sukses terus bekerja. Kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi UMKM sektor industri (Mokodompit, 2019).

Meskipun UMKM terbilang cukup stabil walaupun menghadapi krisis, bukan berarti UMKM tidak memiliki masalah yang dihadapi dalam menjalankannya. Beberapa masalah sering dihadapi oleh UMKM di antaranya ialah kesulitan mendapatkan permodalan. Kemudian hal inilah yang dimanfaatkan oleh Bank-bank di Indonesia dengan menawarkan berbagai produk pinjaman modal kerja atau usaha untuk para pelaku UMKM yang masih terkendala terkait permodalan.

Pemberian modal kerja oleh perbankan yang cukup banyak digemari para pelaku UMKM di Kecamatan Seputih Mataram salah satunya ialah Bank BTPN

Syariah. Di BTPN Syariah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan pembiayaan modal kerja. Modal tersebut dimanfaatkan oleh UMKM untuk mempertahankan usahanya yang mengalami kendala permodalan, bahkan ada juga yang memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan jumlah data nasabah pembiayaan modal kerja di Bank BTPN Syariah di Kecamatan Seputih Mataram pada tahun 2021-2023 yakni:

Tabel 1. Jumlah Nasabah Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2021	787
2.	2022	787
3.	2023	787

Sumber data : Wawancara langsung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya jumlah nasabah pembiayaan modal kerja mulai dari tahun 2021-2023 tidak ada kenaikan maupun penurunan jumlah nasabah. Sebab, perbankan dan koperasi simpan pinjam di daerah saling bersaing untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Alhasil, angka yang tidak berubah ini dapat dikatakan cukup stabil atau konstan.

Bank BTPN Syariah sendiri ialah salah satu lembaga perbankan pembiayaan modal kerja yang cukup populer dan banyak digemari di lokasi penelitian, hal ini diakibatkan oleh beragam faktor seperti bunganya yang kecil sehingga tidak memberatkan saat membayar angsuran dan juga persyaratan yang di ajukan perbankan supaya bisa menerima pembiayaan modal kerja dari Bank BTPN Syariah ini tidak banyak dan rumit. Pembiayaan modal kerja di Kecamatan Seputih Mataram di mulai dengan Rp 2.000.000 hingga Rp 50.000.000 dengan 2 kali angsuran dalam 1 bulan.

Pada pembiayaan modal BTPN Syariah ini ternyata masih banyak nasabah yang mendapat pembiayaan modal kerja yang tidak bertanggung jawab seperti nasabah sering kali tidak sanggup membayar angsuran dan ada juga yang kabur. Sehingga untuk sekarang persyaratan untuk pemberian modal kerja kepada para pelaku UMKM dari Bank BTPN Syariah ini menjadi semakin sulit. Dan ini menjadi masalah bagi kedua pihak, bagi bank dan para pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja. Bagi para pelaku UMKM dengan persyaratan yang semakin rumit ini menyusahakan mereka dalam mendapatkan pembiayaan modal kerja sehingga mereka memilih pindah mengambil pinjaman di

Koperasi yang lebih mudah syarat peminjamannya. Hal ini ialah masalah juga bagi pihak perbankan di karena kan nasabahnya semakin berkurang dan memilih berpindah ke koperasi simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumini dari Sentra Qurnia 01 pada tanggal 12 September 2023, selaku nasabah BTPN Syariah mengatakan : “Syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman modal kerja sekarang lebih rumit dibandingkan pada awal berdirinya BTPN Syariah di sini. Selain itu, setelah angsuran di BTPN Syariah selesai beliau berkeinginan untuk beralih ke pinjaman modal dari Koperasi Mekar. Ini karena syaratnya lebih sederhana daripada BTPN Syariah”.

Pada akhirnya hal ini berimbas pada nasabah lainnya anggota perkumpulan yang satu sentra maupun yang beda sentra juga. Dan hal ini juga tentunya sangat merugikan pihak bank karena harus kehilangan nasabahnya. Kemudian dampak dari banyaknya nasabah yang tidak bisa menepati tanggung jawab mereka tersebut, yang terkena imbasnya ialah anggota kelompok pemberian modal kerja nasabah BTPN Syariah. Selain itu, dalam pembiayaan modal kerja di BTPN Syariah terdapat sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh pihak bank dengan persetujuan nasabah pembiayaan BTPN Syariah. Dalam pendekatan ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank. Semua anggota kelompok harus memikul tanggung jawab ini jika salah satu anggota tidak mampu melakukannya.

Penerapan sistem tanggung renteng menurut nasabah BTPN Syariah itu cukup memberatkan mereka. Berdasarkan wawancara pra survei dengan Ibu Misni dari Sentra Semangka 2 pada tanggal 11 Oktober 2023, selaku nasabah BTPN Syariah mengatakan : “Tanggung renteng cukup memberatkan bagi saya selaku nasabah, karena untuk memenuhi tanggung jawab saya dengan memenuhi angsuran selama 2 kali dalam 1 bulan saja terkadang sulit untuk mengumpulkan uang tersebut”.

Nasabah sulit mengumpulkan uang di sebabkan oleh pendapatan UMKM yang tidak pasti terkadang sepi dan terkadang juga ramai, terlebih jika sedang masa paceklik di mana gagal panen hasil kebun para petani. Karena di lokasi penelitian mayoritas ialah petani, jadi target marketingnya para pelaku UMKM di sana mayoritas pekerjaannya ialah seorang petani. Dan dengan adanya penerapan sistem tanggung renteng ini mereka juga diwajibkan menanggung secara bersama kewajiban pembayaran pinjaman modal kerja salah satu anggota

kelompok. Oleh karena itu, banyak nasabah yang merasa keberatan dengan penerapan sistem ini ada juga yang tidak.

Pemahaman tentang literasi keuangan yang kurang pun juga turut jadi permasalahan para pelaku UMKM. UMKM di Kecamatan Seputih Mataram mempunyai permasalahan literasi keuangan karena tidak mengelola keuangannya secara sistematis. Contohnya ialah mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis dan tidak mencatat pendapatan dan pengeluaran bisnis secara rinci. Keberlangsungan usaha kecil atau menengah dalam jangka panjang akan terpengaruh jika pengelolaan keuangannya tidak memadai. Mayoritas dari mereka kurang memiliki keterampilan manajemen keuangan.

Dari 36 nasabah yang dilakukan wawancara pra survei penelitian ini, semua dari mereka tidak mencatat atau membuat laporan keuangan barang masuk dan keluar. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terkait literasi keuangan. Jika hal seperti ini terus dilakukan oleh para pelaku UMKM, maka pengelolaan keuangan UMKM tidak lagi baik dan keuangannya bisa terdampak. Pemilihan responden berdasarkan nasabah pembiayaan BTPN Syariah yang memili usaha dan mendapatkan pendampingan dari mahasiswa pada program magang kampus merdeka. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwasanya responden tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnisnya. Selain itu, menurut Suardana, K.A. (2020), jika pelaku usaha mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, mereka mungkin tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang akan diperoleh setiap bulannya. Jika pelakunya tidak pandai mengelola keuangan, bisa jadi mereka akan kehabisan modal kerja, sehingga berdampak besar pada kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam usahanya.

Berdasarkan penelitian (Dewi & Herawati, 2023) Literasi keuangan memengaruhi keberlanjutan bisnis mikro, kecil, dan menengah, tetapi modal usaha tidak memengaruhi keberlanjutan bisnis tersebut. Penelitian Ayu dan Dewi pada tahun 2022 menunjukkan bahwasanya pengetahuan literasi keuangan juga membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng untuk tetap bertahan dalam usahanya. Namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya penelitian mengenai modal usaha justru berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Namun, menurut penelitian (Iqnatia *et al.*, 2021), literasi keuangan tidak memengaruhi keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan ini di rumuskan berdasarkan konteks berikut:

1. Apakah pemberian modal kerja berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram?
2. Apakah tanggung renteng berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram?
4. Apakah pemberian modal, tanggung renteng dan literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini yang menjadi landasan tujuan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemberian modal kerja memberi pengaruh terhadap keberlangsungan usaha nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram?
2. Untuk mengetahui apakah nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram terkena dampak tanggung jawab tanggung renteng dalam kelangsungan usahanya.
3. Untuk mengetahui apakah nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram terpengaruh keberlangsungan usahanya melalui literasi keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah pemberian modal, tanggung renteng, dan literasi keuangan kepada nasabah BTPN Syariah di kecamatan Seputih Mataram terpengaruh oleh variabel tersebut terhadap kelangsungan usahanya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Melalui susunan logika tersebut dipercaya dapat menyumbangkan pemikiran bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan pengetahuan mengenai

dampak pemberian modal kerja, tanggung jawab bersama dan pendidikan moneter terhadap keberlangsungan usaha.

2. Kegunaan Praktis

Tulisan ini memiliki manfaat praktis dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan institusi untuk dijadikan panduan.

3. Kegunaan bagi penulis

Penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat kepada penelitian, seperti :

- a. Membantu penulis memahami bidang UMKM
- b. Meningkatkan kemampuan analisis penulis
- c. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami bidang yang penulis minati

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan di fokuskan pada suatu wilayah tertentu, yakni di Lampung Tengah Kecamatan Seputih Mataram. Untuk Responden atau subjek penelitian ini akan melibatkan nasabah BTPN Syariah penerima modal kerja yang berada di kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.